

**Pemikiran dan Kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Era Reformasi (1998-2009)**

Oleh Zudi Setiawan

*Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim Semarang*

**Abstract**

***In the 1998-2009 period, Indonesia is in the multidimensional crisis conditions and the threat of a split in the (disintegration) of the nation and also the threat appears to come from outside such as claims or annexation of the small islands of Indonesia by other countries. In the course of the history of thought and policy of NU in the reform era (1998-2009) shows that NU plays an important role in maintaining the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia territory. National ideology which is owned by the NU was based on a religious basis in addition to all the objective conditions of the nation and a pluralistic nation of Indonesia. National ideology is what makes NU known as a nationalist Islamic organization. From the ideological basis of nationality is also the NU at the forefront in safeguarding the sovereignty of the Republic of Indonesia territory.***

***Key Words : Nahdlatul Ulama, Thought, Policy, Nationalism, the sovereignty of the Republic of Indonesia territory***

**A. Pendahuluan**

Umat Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Tanah Air. Demikian juga dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia sejak dilahirkan pada 1926 hingga sekarang. NU adalah sebuah organisasi (*jam'iyah*) yang didirikan oleh para ulama dan mengumpulkan komunitas umat Islam (*jamaah*) dengan berbagai karakteristik khusus yang dimiliki. Kekhasan yang dimiliki NU menjadi modal utama dalam mencirikan dirinya di tengah pluralitas bangsa. Corak NU yang dikenal tradisional (menghargai tradisi),

moderat, toleran, sekaligus mengutamakan keselarasan ini telah menjadi salah satu warna dari umat Islam Indonesia yang lebih majemuk.

Tujuan utama NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *ahlussunnah wal jamaah*<sup>1</sup> dan menurut salah satu dari madzhab empat

---

<sup>1</sup> Makna *ahlussunnah wal jamaah* menurut NU tidak ubahnya seperti definisi yang dikemukakan oleh KH. Siradjuddin Abbas bahwa *ahlussunnah* berarti penganut sunnah Nabi Muhammad; sedangkan *wal jama'ah* adalah penganut *i'tiqad* sebagaimana *i'tiqad jamaah Sahabat-sahabat Nabi Muhammad*. Menurut istilah, kaum *ahlussunnah wal jama'ah* adalah kaum yang menganut *i'tiqad* seperti *i'tiqad* yang dianut oleh Nabi Muhammad dan para Sahabatnya. Dasar gerakan keagamaan NU sudah jelas, yakni sebagai penganut sunnah Nabi Muhammad dan pemegang teguh sunnah Sahabat Nabi. Lihat KH. Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2002, hal. 16.

(Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).

Organisasi ini lahir dari wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) pada awal abad XX. Dilihat dari wawasan keagamaan, kelahiran NU merupakan reaksi atau respon dari kalangan ulama terhadap adanya upaya pembaruan yang dilakukan oleh kalangan modernis Islam baik dalam skala nasional (Indonesia) maupun internasional<sup>2</sup>.

Arti penting lain pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan dengan wawasan

kebangsaan (nasionalisme) yang selalu dijadikan sebagai salah satu dasar perjuangannya selama ini. Wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang dimiliki oleh NU tersebut dapat dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang pemikiran dan kebijakan NU dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI selama kurun waktu 1998-2009. Arti penting dari kegiatan penelitian ini terutama didasarkan pada tujuan untuk semakin memperkaya khasanah keilmuan tentang NU yang dirasakan masih kurang hingga saat ini. Masih jarang penelitian yang mengkaji tentang dasar-dasar pemikiran politik dan pengambilan kebijakan oleh NU dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI selama kurun waktu 1998-2009. Apalagi, pada kurun waktu 1998-2009 inilah Indonesia berada dalam kondisi krisis multidimensi dan berada dalam ancaman perpecahan (disintegrasi) bangsa serta muncul pula ancaman yang datang dari luar seperti klaim atau pencaplokan terhadap pulau-pulau kecil Indonesia oleh negara lain. Pada awal digulirkannya reformasi, juga mulai tumbuh gerakan-gerakan separatisme di berbagai daerah. Di samping itu, mulai berkembang pula wacana yang menginginkan adanya perubahan bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi.

## B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di

<sup>2</sup> Raja Ibnu Sa'ud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pral-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap *bid'ah*. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah Pimpinan KH. Ahmad Dahlan maupun Sarekat Islam (SI) di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Lihat NU Online, "Sejarah NU", dalam <http://www.nu.or.id>, diakses pada 14 Maret 2006 pukul 18.30 WIB

atas, maka terdapat pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pemikiran dan kebijakan NU dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI pada Era Reformasi (1998-2009).

### C. Pembahasan

#### NU Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI dari Asing

Di tengah era globalisasi yang melahirkan ideologi kapitalisme, kedaulatan wilayah NKRI menghadapi tantangan dari upaya-upaya pencaplokan pulau-pulau terpencil oleh negara lain. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia baik darat maupun perairan memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran negara lain. Salah satu contoh masalah yang masih terjadi hingga saat ini adalah masalah Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, pulau Sipadan dan Ligitan juga telah jatuh ke tangan Malaysia. Hal ini tentu berbeda ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang juga Ketua Umum PBNU 1984-1999.

#### Respon terhadap Ancaman Disintegrasi

Dominasi Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam pelaksanaan politik luar negeri sangat menonjol. K.H. Abdurrahman Wahid sendiri telah bertekad akan mengadakan lawatan keliling dunia dalam tahun pertama masa kepresidenannya. Tujuan K.H. Abdurrahman Wahid sangat jelas, bahwa lawatan maraton ke luar negeri ini untuk mengembalikan nama baik

Indonesia di mata internasional. Dari kunjungan-kunjungan luar negeri ini diharapkan agar investor asing menanamkan kembali modalnya secara besar-besaran di Indonesia. Presiden berulang kali juga menjelaskan bahwa tujuannya ke manca negara adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, termasuk Aceh dan Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Indonesia<sup>3</sup>.

Budiarto Shambazy, wartawan harian *Kompas*, berpandangan bahwa kegiatan lawatan keliling dunia yang dilakukan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid mencerminkan bahwa K.H. Abdurrahman Wahid memiliki pemahaman terhadap perkembangan dunia internasional yang cukup cangguh dan berbobot. Kunjungannya ke negara-negara Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, membuktikan pula bahwa K.H. Abdurrahman Wahid sesungguhnya adalah figur presiden yang visioner, memiliki sebuah visi dunia dan

<sup>3</sup> Atas lawatan keliling dunia yang dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid ini, pada Minggu awal Mei 2000, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), *Guines Book of World Record*-nya Indonesia, mencatat rekor baru: K.H. Abdurrahman Wahid adalah presiden yang melakukan kunjungan ke mancanegara terbanyak dan dalam waktu tersingkat.<sup>3</sup> Dalam buku *Rekor-rekor MURI*, juga tercatat bahwa K.H. Abdurrahman Wahid adalah presiden yang melakukan kunjungan ke mancanegara tercepat. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke 3 (tiga) negara hanya dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand.<sup>3</sup> Memang menjadi kenyataan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah mencapai prestasi "yang ter" dalam hal lawatan ke luar negeri. Bahkan, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak hanya mengalahkan Presiden Soekarno, Soeharto, maupun Habibie, namun termasuk juga presiden-presiden lain di seluruh dunia, karena Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam waktu singkat setelah dilantik sebagai Presiden RI langsung keliling dunia. Lihat Aylawati Sarwono, *Rekor-rekor MURI*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal.283. Lihat pula Media Indonesia, 17 Februari 2000 dalam [http://www.mediaindo.co.id/detail\\_news.asp?id=2000021700093290](http://www.mediaindo.co.id/detail_news.asp?id=2000021700093290). Kemudian analisis tentang lawatan luar negeri Presiden K.H. juga terdapat dalam Budiarto Shambazy, *Politik Luar Negeri "Tur Keliling Dunia" Ala Gus Dur*, dalam J.B. Kristanto (Ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 163-164.

bagaimana Indonesia seharusnya memainkan peranan sebagai negara menengah di Asia Pasifik. Sehingga, K.H. Abdurrahman Wahid telah menjalankan salah satu tugas penting seorang kepala negara secara baik, yakni melakukan kunjungan kenegaraan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sesuai dengan garis-garis besar politik luar negeri Indonesia. Kunjungan kenegaraan juga merupakan simbol yang sangat penting dari sebuah hubungan bilateral yang erat dan harmonis antara kedua pemimpin dan bangsa, baik yang mengunjungi maupun yang dikunjungi<sup>4</sup>.

Tercatat bahwa hingga akhir tahun 2000, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah melakukan perjalanan ke mancanegara sebanyak 15 kali dengan mengunjungi 39 negara. Beberapa negara di antaranya—Singapura, Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat—dikunjungi K.H. Abdurrahman Wahid dua atau tiga kali. Kunjungan K.H. Abdurrahman Wahid ke luar negeri di antaranya: (1) 6-9 Nopember 1999: Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Filipina; (2) 11-16 Nopember 1999: Amerika Serikat, Jepang; (3) 22-25 Nopember 1999: Kuwait, Qatar, Jordania; (4) 27-29 Nopember 1999: Filipina; (5) 1- 3 Desember 1999: RRC; (6) 28 Januari-12 Februari 2000: Arab Saudi, Swiss, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Vatikan, Ceko, Belgia, India, Korea Selatan, Thailand; (7) 27

Pebruari 2000: Brunei Darussalam; (8) 8-17 April 2000: Afrika Selatan, Meksiko, Kuba, Hongkong, Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Iran, Mesir; (9) 7 - 12 Juni 2000: Amerika Serikat, Iran, Pakistan; (10) 4-11 September 2000: Amerika Serikat; (11) 25 September-5 Oktober 2000: Venezuela, Brasil, Cile, Kanada; (12) 17-21 Oktober 2000: Malaysia, Hongkong, Korea Selatan; (13) 12-14 Nopember 2000: Qatar; (14) 24-25 Nopember 2000: Singapura; (15) 14-15 Desember 2000: Thailand.<sup>5</sup>

Apabila dianalisis lebih jauh, rangkaian perjalanan luar negeri yang dijalankan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid memiliki beberapa misi utama, antara lain untuk mendapatkan dukungan internasional bagi keutuhan teritorial Indonesia. Dalam hal ini, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah mengingatkan berbagai negara bahwa kunjungannya ke mancanegara, terutama ke negara-negara besar, adalah dalam misi mempertahankan integrasi nasional Indonesia, yang merupakan kepentingan seluruh dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Indonesia berusaha mengutamakan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara ASEAN, AS, Eropa, dan Asia Pasifik, seperti Australia, RRC dan Jepang, terhadap kebijakan pemerintah dalam merespons ancaman disintegrasi bangsa, yang dinilai merupakan salah

<sup>4</sup> Budiarto Shambazy, *Politik Luar Negeri "Tur Keliling Dunia" Ala Gus Dur*, dalam J.B. Kristanto (Ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 168-169.

<sup>5</sup> Kompas, 20 Desember 2000, Hal. 55.

satu kepentingan nasional yang bersifat mendesak dan perlu diprioritaskan.<sup>6</sup>

Dalam lawatannya ke Malaysia, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid memperoleh kepastian dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengenai sikap resmi pemerintah Malaysia yang tidak membantu aktifitas para separatis GAM, yang selama ini dicurigai banyak dijalankan melalui para pekerja migran asal Aceh. Pasca-kunjungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, kerja sama lintas perbatasan antara aparat keamanan Indonesia-Malaysia semakin ditingkatkan, dengan turut memperhatikan aktifitas lintas batas para aktifis GAM di sekitar perbatasan Malaysia, termasuk kawasan perairannya, yang seringkali dijadikan jalur penyelundupan senjata ke Aceh. Sehingga, lawatan presiden ke luar negeri pertama ke negara-negara ASEAN telah direspons dengan kesamaan sikap mengenai masalah keamanan domestik kedua negara, dan juga keamanan di kawasan.<sup>7</sup> Dukungan terhadap pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid dan integritas teritorial Indonesia, juga diperoleh dalam perjalanan selanjutnya beliau ke Bangkok (Thailand), Yangoon (Myanmar), Vientiane (Laos), Phnom

Penh (Kamboja), Hanoi (Vietnam), dan Manila (Philipina).

Sebagai bukti keseriusan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk memperoleh dukungan internasional atas kedaulatan Indonesia terhadap Irian Jaya yang hendak memisahkan diri, dari tetangga terdekatnya yang berbatasan langsung dengan wilayah itu, ia telah mengadakan kunjungan ke Papua Nuigini. Sementara, pemerintah Papua Nuigini secara tegas telah menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia atas wilayah Irian Jaya yang sedang bergolak. Sikap pemerintah Papua Nuigini cukup serius, karena ditindaklanjuti dengan peningkatan patroli di sepanjang wilayah perbatasan dengan Indonesia yang menjadi wilayah pertikaian, dengan tindakan akan memulangkan penduduk Irian Jaya yang masuk atau mengungsi karena pemberontakan, ke wilayah Papua Nuigini. Walaupun memiliki hubungan geografis dan kultural dengan penduduk Irian Jaya, secara eksplisit Perdana Menteri Papua Nuigini, Sir Mekere Morautahe, telah menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati kedaulatan dan integritas negara Indonesia. Karenanya, apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, baginya merupakan masalah dalam negeri Indonesia.<sup>8</sup>

Pemerintah Australia walaupun dicurigai turut memberi angin kepada para aktivis gerakan separatisme Irian Jaya yang mulai gencar melakukan lobi ke berbagai kalangan di Australia, melalui Menlu Alexander Downer, telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak benar mendukung Papua Merdeka.

<sup>6</sup> Pollak Partogi Nainggolan, *Diplomasi Ofensif Pemerintahan Wahid: Analisis dari Perspektif Politik*, dalam Tim Peneliti Hubungan Internasional Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR RI, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 2001, Hal. 18-19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 19-20.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal. 23-24.

Bahkan, dalam kesempatan mengikuti pertemuan Pemimpin Ekonomi Asia Pasifik (AELM) ke-8 pada 15-16 Nopember 2000, di Brunei Darussalam, PM Australia John Howard dan PM Selandia Baru Helen Clark telah menyatakan secara eksplisit bahwa wilayah Irian Jaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Penegasan sikap yang disampaikan oleh PM Howard ini sudah merupakan bagian dari isi position paper mengenai sikap Canberra terhadap Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan integritasi teritorial Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lawatan ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid memberikan hasil konstruktif berupa diperolehnya dukungan internasional terhadap integritas teritorial Indonesia. Sehingga, di bawah kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid belum ada sebuah negara pun yang mendukung gerakan separatisme di Indonesia.

### **Respon NU dalam Keputusan Mukhtamar**

Menanggapi bahaya pencaplokan pulau-pulau terpencil oleh negara lain, NU merespon dalam salah satu keputusan Mukhtamar NU ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004 tentang Taushiyah Mukhtamar bidang politik internasional, ditetapkan bahwa:

Hubungan antara bangsa baik di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan hendaklah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

kesetaraan dan keadilan serta membuang segala bentuk eksploitasi dan penjajahan. Karena itu segala bentuk investasi dan bantuan asing haruslah diletakkan sebagai upaya emansipasi rakyat bukan sebaliknya untuk menciptakan ketergantungan dan mematikan kreativitas bangsa.

NU Menolak liberalisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya yang sangat gencar menjajah bangsa lain atas nama pasar bebas dan globalisasi, karena prinsip ini telah digunakan untuk menguasai bangsa lain, sehingga merusak tatanan sosial bangsa lain. Selain itu kehidupan negara dan rakyat menjadi sangat tergantung pada negara besar sehingga mengakibatkan kehidupan rakyat makin sengsara.

NU Menolak segala bentuk pengambilalihan aset strategis negara baik sektor ekonomi atau sektor pendidikan dan kebudayaan oleh pihak asing, dengan alasan privatisasi, divestasi atau pun komersialisasi. Demikian juga **pengambilalihan aset strategis yang bersifat geografis seperti pencaplokan pulau terpencil sampai soal penggeseran tapal batas Negara Republik Indonesia yang marak belakangan ini adalah merupakan bentuk kolonialisme yang harus ditolak dan segera dihentikan operasinya**, karena tindakan tersebut benar-benar telah melanggar kedaulatan Negara dan menghina martabat rakyat

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 24-25.

Indonesia secara keseluruhan sebagai sebuah bangsa yang merdeka.<sup>10</sup>

Mantan Ketua PBNU yang juga mantan Dubes RI untuk Syria Chalid Mawardi berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia, pemerintah Indonesia sebaiknya menempuh jalur diplomasi bilateral. Chalid Mawardi menyatakan:

Dengan menimbang situasi nasional, dukungan ekonomi dan kekuatannya, Indonesia perlu menghindari penggunaan kekuatan militer dan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia. Dengan segala kelemahan yang dimilikinya, Indonesia lebih tepat menggunakan cara-cara diplomasi. Dengan situasi yang sedang dihadapi Indonesia dan teknologi militer yang tidakimbang, jangan pernah berpikir untuk perang dengan pihak Malaysia, dengan diplomasi bilateral, Indonesia harus mempertahankan haknya atas Ambalat yang sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam menunjukkan bukti-bukti legitimasinya. Dalam logika hubungan antar bangsa, pihak yang lebih dahulu mengelola pulau yang masih dianggap asing biasanya disebut sebagai pemiliknya. Jadi pengelolaan negara

tertentu secara lebih awal atas kepulauan yang disengketakan akan sangat menguatkan status kepemilikan wilayah tersebut. Jadi tergantung bendera siapa yang berkibar di sana, siapa yang lebih dulu mendiaminya? Dalam penyelesaian ini tidak cukup hanya dengan bukti bahwa secara *de facto*, RI lebih dahulu mengelola Blok Ambalat dan Ambalat Timur, pemilihan media penyelesaiannya juga menentukan. Apakah memilih diplomasi bilateral ataukah Mahkamah Internasional? Kalau Indonesia memilih Mahkamah Internasional, sangat kecil kemungkinan Indonesia akan menang. Sebab, biayanya tidak kecil. Bisa-bisa dana APBN tersedot ke sana semua. Lain halnya bagi Malaysia, melalui jalur Mahkamah Internasional, ia akan diuntungkan, dia punya uang dan kemungkinan besar juga akan dibantu negara-negara persemakmuran yang lain. Saya menganjurkan kepada Pemerintah Indonesia untuk memilih jalan diplomasi bilateral. Dengan jalan bilateral, maka lebih mungkin diperoleh hasil penyelesaian yang adil. Indonesia harus menyiapkan diri dalam diplomasi bilateral, buktikan bahwa memang Blok Ambalat dan Ambalat Timur itu merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur, dan bukan kelanjutan alamiah daratan Sabah. Jadi ambil jalan diplomasi, jangan jalan

<sup>10</sup> PBNU, Taushiyah Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama, dalam PBNU, *Hasil-hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama*, Sekretariat Jenderal PBNU, Jakarta, tt, hal. 63.

Perang, persenjataan Malaysia lebih canggih dibanding Indonesia, apalagi dengan dukungan negara-negara persemakmuran Inggris, kecuali Indonesia bisa ajak Singapura untuk menghadapi Malaysia<sup>11</sup>

Sementara itu, menurut Ketua PBNU yang mengurus hubungan luar negeri yang juga mantan Menteri BUMN HM Rozy Munir, bahwa kawasan Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya harus dipertahankan sebagai bagian dari NKRI. Namun demikian, PBNU mengharapkan agar diutamakan penyelesaian diplomasi atas masalah tersebut. NU telah terbukti sejak dahulu berupaya mempertahankan kedaulatan NKRI seperti yang dilakukan oleh para sesepuh NU seperti KH Munasir, KH Wahab Hasbullah, KH. Sullam, dan lainnya. Dalam hal ini, Rozy Munir menjamin bahwa PBNU akan berusaha secara maksimal berperan aktif menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama dengan menjalin komunikasi antar ormas dan ulama, baik di Indonesia maupun dari Malaysia. Rozy Munir juga mengingatkan bahwa konflik ini sudah melibatkan pihak ketiga, yaitu para perusahaan minyak yang mengeksplorasi kawasan tersebut, oleh karena itulah kedua belah pihak harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan pihak ketiga demi kepentingan mereka sendiri.<sup>12</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Barisan Muda

Nahdlatul Ulama (BMNU), Maksum Zuber yang menyatakan bahwa dirinya siap mengerahkan massa untuk menggalang relawan guna menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, termasuk soal konflik Blok Ambalat demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, sikap Malaysia yang suka memancing-mancing konfrontasi dinilai sudah keterlaluan. Bahkan bukan kali ini saja Malaysia melanggar wilayah kedaulatan NKRI, mereka bahkan memprovokasi. Maksum menginginkan agar pemerintah dan DPR mengambil langkah tegas dengan melayangkan sikap protes ke Kedubes Malaysia di Jakarta.<sup>13</sup>

Dengan demikian, bagi NU, pengambilalihan aset strategis yang bersifat geografis seperti pencaplokan pulau terpencil sampai soal penggeseran tapal batas Negara Republik Indonesia yang marak belakangan ini adalah merupakan bentuk kolonialisme yang harus ditolak dan segera dihentikan operasinya, karena tindakan tersebut benar-benar telah melanggar kedaulatan negara dan menghina martabat rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dengan penolakan ini NU ingin tetap mengawal kedaulatan wilayah NKRI.

### **NU Menolak Federalisme dan Separatisme**

NU memiliki pandangan bahwa dalam membangun Indonesia baru perlu diawali dengan mendorong terciptanya *ishlah* nasional berdasarkan prinsip kebenaran untuk mewujudkan

<sup>11</sup> NU Online, Warta, 11 Maret 2005

<sup>12</sup> NU Online, Warta, 10 Maret 2005

<sup>13</sup> NU Online, Warta, 6 Juni 2009



keadilan bagi semua pihak. Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik antar ras dan suku juga generasi yang akan datang yang akan mengakibatkan perpecahan di negeri ini, menimbulkan friksi (kelompok) di negeri ini, yang telah menimbulkan diskriminasi, represi sehingga menghilangkan peluang yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai warga negara.<sup>14</sup> Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi berkembangnya gerakan federalisme maupun separatisme yang didasarkan pada paham kedaerahan maupun kesukuan.

Merespon berkembangnya upaya menumbuhkan federalisme yang bertujuan mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi, NU merasa perlu untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan Indonesia dengan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara ini. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar NU ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004 tentang Taushiyah Mukhtamar di bidang politik nasional, yang berbunyi:

Mengukuhkan kembali komitmen kebangsaan yang pudar yang diakibatkan oleh situasi krisis dan semangat reformasi yang berlebihan. Lantaran semua itu tidak hanya mengakibatkan hilangnya integritas bangsa dengan munculnya gerakan federalisme bahkan

separatisme yang mengancam kesatuan nasional RI. Tetapi juga menghancurkan tertib dan struktur sosial yang sudah mapan, sehingga merusak relasi sosial, yang kemudian memunculkan rasa saling curiga dan saling membenci yang berujung pada konflik sosial. Dalam situasi sekarang penguatan komitmen kebangsaan tidak bisa dijalankan dengan cara paksaan apalagi kekerasan tetapi perlu strategi kebudayaan baru untuk menata hubungan sosial dan hubungan antar bangsa berdasarkan kesetaraan dan kesukarelaan, sehingga solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan bisa diwujudkan. Bagi Warga Nandliyin Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan.<sup>15</sup>

Kedaulatan dan keutuhan NKRI seringkali terancam dengan munculnya berbagai gerakan separatisme di berbagai tempat di Indonesia, misalnya adalah yang terjadi di Aceh dan Papua. Menanggapi hal ini, para kiai NU mengadakan Bahtsul Masa'il tentang gerakan separatisme. Dari perspektif konsep bughat dalam fikih, para ulama NU menyimpulkan bahwa separatisme itu memang tidak dibenarkan. Dalam fikih, gerakan separatisme menurut ulama NU, sering disebut dengan *al-khuruj 'an al-imam* (membangkang terhadap penguasa). Bahkan dalam

<sup>14</sup> PBNU, Taushiyah Mukhtamar Ke-31 Nahdlatul Ulama, dalam PBNU, *Hasil-hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama*, Sekretariat Jenderal PBNU, Jakarta, tt, hal. 62.

<sup>15</sup> PBNU, Taushiyah Mukhtamar Ke-31 Nahdlatul Ulama, dalam PBNU, *Hasil-hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama*, Sekretariat Jenderal PBNU, Jakarta, tt, hal. 62-63.

fikih, gerakan separatisme bisa dihadapi dengan kekuatan senjata, meskipun ada syaratnya, yaitu *pertama*, bahwa gerakan separatisme itu telah diajak berunding, namun ia tidak mau. *Kedua*, gerakan separatisme itu menggunakan senjata. Jadi kalau gerakan separatisme diajak berunding tidak mau, mereka juga menggunakan kekuatan senjata dan mereka menyatakan penolakan terhadap pemerintahan, maka gerakan separatis itu bisa dihadapi dengan kekuatan bersenjata, tetapi tetap menjunjung tinggi etika perang bahwa tidak boleh merusak properti maupun menyakiti warga negara, khususnya yang sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Itulah prinsip-prinsip yang diatur oleh NU dalam mempertahankan NKRI<sup>16</sup>.

Ketua Lajnah Bahtsul Masail PBNU K.H. Yasri Marzuki berpandangan bahwa semestinya pemerintah berusaha mengurangi konfrontasi dan konflik dengan GAM. Ia lebih menyetujui penggunaan cara-cara yang damai dan musyawarah antara GAM dengan pemerintah. K.H. Yasri Marzuki mengatakan:

Menurut saya, dengan selalu berunding antara pemerintah NKRI dengan GAM, pada saatnya akan menghasilkan titik temu yang melahirkan solusi konflik di sana. Akan tetapi, untuk menuntaskan konflik ini memang diperlukan waktu yang lama. Tentu saja karena persepsi yang ada pada pencitraan akal kedua pihak yang berbeda. Pemerintah akan tetap memiliki anggapan

negatif dan kecurigaan terhadap GAM karena mereka telah melakukan pengingkaran terhadap kedaulatan NKRI. Sebaliknya, pihak GAM juga memiliki anggapan dan stigma bahwa pemerintah Indonesia hanya akan berusaha menjinakkan keliaran mereka tanpa ada upaya perbaikan yang lebih kongkret terhadap ketidakadilan ekonomi (*al-adalah al-iqtishadiyah*) yang telah terjadi selama ini. Selain itu juga dibutuhkan tanggung jawab secara adil antara masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur yang juga mantan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Propinsi Jawa Timur K.H. Syaifudin menyatakan bahwa mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI adalah tugas penting umat Islam Indonesia pada saat ini. Hal ini semakin penting karena Indonesia tengah menghadapi persoalan serius yaitu kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Muncul keinginan dari beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI. K.H. Syaifudin juga berpendapat bahwa perlu dilakukan upaya penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Daerah sehingga aturan tersebut nantinya tidak mengilhami suatu daerah untuk memisahkan diri dari negara nasional. Aturan tersebut dibuat harus dengan didasari semangat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dan memajukan kesejahteraan masyarakat. K.H. Syaifudin menolak upaya beberapa

<sup>16</sup> K.H. Masdar F. Mas'udi dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 17 Tahun 2004, hal. 136-138

<sup>17</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, LkiS, Yogyakarta, 2007, Hal. 178.

pihak yang ingin mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi. Dalam pandangannya, sistem federasi justru sangat longgar dan dapat memicu semangat separatisme dari daerah.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Sekretaris Lajnah Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Syuro Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Benowo Surabaya K.H. Syahid, GAM adalah sisi buruk dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah GAM itu. Hal ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Menurut K.H. Syahid, jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah GAM dan aktivitasnya yang ingin memisahkan diri dari NKRI, maka hal itu menunjukkan bahwa rasa nasionalisme di Indonesia belum mantap dan mengalami masalah yang serius. Atau, dalam perkataan lain, nasionalisme di Indonesia masih berhenti pada tahapan nasionalisme sempit dan juga menunjukkan bahwa yang menguat adalah etno-nasionalisme.<sup>19</sup>

Wakil Rais Syuriah PWNNU Jawa Timur K.H. Syarief Djamhari menyatakan bahwa Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Selanjutnya, ia menyatakan:

Menurut saya, GAM bisa dikategorikan sebagai pemberontak (*bughat*) jika memenuhi empat syarat,

yaitu pertama, pelaku beragama Islam. Kedua, mempunyai kekuatan massa yang terorganisir. Ketiga, menentang kepada pemerintahan yang sah. Dan keempat, mempunyai tuntutan politik tertentu, seperti pemisahan dari negara pusat. Akan tetapi, jika GAM tidak memenuhi keempat syarat itu, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai teror (*ifsad*) dan pelakunya termasuk perampok (*quttha' ath-thariq*)<sup>20</sup>

Sementara itu Plh. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Drs. H. Anasom, M.Hum. memiliki pandangan bahwa dalam konteks negara nasional, keberadaan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan gerakan separatis lainnya itu adalah bentuk pemberontakan. Namun demikian, dalam penyelesaiannya perlu dicari cara-cara yang damai bukan selalu dengan cara-cara yang militeristik. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah yang sedang bergolak seperti Aceh dan Papua.<sup>21</sup>

Sedangkan, Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Drs. M. Djamil Mudassir berpendapat bahwa GAM itu misinya adalah politik bukan misi agama. Drs. M. Djamil Mudassir mengatakan:

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 208.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Plh. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Drs. H. Anasom, M.Hum. pada 27 Juni 2009.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 188.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 193.

GAM itu kan misinya kan politik bukan misi agama. Walaupun sering dikatakan bahwa GAM ingin memperjuangkan Islam. Kalau menurut saya, untuk menangani masalah GAM sebagaimana pernah disampaikan Gus Dur yaitu bukan dengan pendekatan kekerasan dan cara-cara militeristik. NKRI termasuk di dalamnya ada Aceh, harus tetap utuh tanpa melalui pertumpahan darah. Harus diingat bahwa Indonesia itu bukan negara agama, bukan negara Islam, walaupun mayoritas muslim. NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu bagi NU sudah final. Dan, NU adalah ormas Islam yang pertama kali menyatakan menerima asas tunggal Pancasila. Walaupun NU dikritik habis-habisan oleh karena itu. Karena NU memang ingin NKRI utuh. NU tidak setuju dengan gerakan separatisme yang ingin melepaskan diri dari NKRI.<sup>22</sup>

Terkait dengan ancaman gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), Ketua PWNU Ambon H. Kilwo menyatakan bahwa seluruh warga NU di Maluku tak ada yang terlibat RMS. Warga NU di Maluku tetap memperjuangkan tegaknya NKRI. Keberadaan kelompok pemberontak Republik Maluku Selatan (RMS) di daerah Maluku ternyata tidak mendapat simpati dari warga

NU dan umat Islam di Maluku. Mereka tetap teguh memperjuangkan tegaknya NKRI. Upaya yang dilakukan oleh PWNU Ambon dalam mengatasi ancaman gerakan separatis RMS yaitu bersama dengan ormas dan pemuka agama Islam lainnya, PWNU Ambon melakukan kunjungan ke sejumlah fihak untuk menyatakan dukungan terhadap tegaknya NKRI dan posisi RMS dimata umat Islam.<sup>23</sup>

Dari sinilah kemudian dapat dipahami bahwa NU telah mengambil kebijakan untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan Indonesia dengan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara ini. Kebijakan tersebut diambil untuk merespon berkembangnya upaya menumbuhkan federalisme yang bertujuan mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi di Indonesia. Pemikiran para tokoh dan pengurus NU juga sejalan dengan kebijakan yang telah diambil oleh NU secara organisatoris yang tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

### Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bergulirnya gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa perubahan besar bagi perkembangan politik di Indonesia. Pada kurun waktu 1998-2009 inilah Indonesia berada dalam kondisi krisis multidimensi dan berada dalam ancaman perpecahan (disintegrasi) bangsa serta muncul pula ancaman yang datang dari luar seperti klaim atau

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Drs. M. Djamil Mudassir, 24 Juli 2009.

<sup>23</sup> NU Online, *Warta*, 6 Juli 2007

pencaplokan terhadap pulau-pulau kecil Indonesia oleh negara lain. Pada awal digulirkannya reformasi, juga mulai tumbuh gerakan-gerakan separatisme di berbagai daerah. Di samping itu, mulai berkembang pula wacana yang menginginkan adanya perubahan bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi.

Dalam perjalanan sejarah pemikiran dan kebijakan NU pada era Reformasi (1998-2009) menunjukkan bahwa NU memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Ideologi kebangsaan yang dimiliki oleh NU ini berpijak pada dasar keagamaan di samping pula pada kondisi objektif bangsa dan negara Indonesia yang plural. Ideologi kebangsaan inilah yang menjadikan NU dikenal sebagai organisasi Islam yang nasionalis. Dari dasar ideologi kebangsaan ini pula maka NU berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

#### Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. 2002. *I'tiqad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hakim, Lukman. 2004. *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci*. Jakarta: LP3ES

- \_\_\_\_\_, dkk. 2003. *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Hartono. 2003. *Bagaimana Menulis Tesis?: Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses*. Malang: UMM Press
- Kristanto, J.B. (Ed.). 2000. *1000 Tahun Nusantara*. Jakarta: Kompas
- Lajnah Bahtsul Masail PBNU. 2004. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Khalista
- \_\_\_\_\_. tt. *Hasil-hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS
- Sarwono, Aylawati. 2009. *Rekor-rekor MURI*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Setiawan, Zudi. 2007. *Nasionalisme NU*. Semarang: Aneka Ilmu

#### Sumber data dari Majalah, Koran dan Website

- Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 17 Tahun 2004
- Media Indonesia, 17 Februari 2000
- NU Online dalam <http://www.nu.or.id>

**Wawancara**

Wawancara dengan Plh. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Drs. H. Anasom, M.Hum. pada 27 Juni 2009.

Wawancara dengan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Drs. M. Djamil Mudassir, 24 Juli 2009.

